

Bekerja memperluas dan memperkuat jaringan pemantau independen di Indonesia

Bekerja untuk pemantau independen dari organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan adat, kelompok perempuan dan pemuda

Bekerja dengan Seknas JPIK, FWI, Kaoem Telapak, LEI, INFIS, PPLH Mangkubumi, Absolute Indonesia, Deling Kuning, Jikalahari, Genesis, Focal Point JPIK Jambi, Focal Point JPIK Lampung, ARuPA, AMAN Tano Batak, Save Aru, Papua Forest Watch, Panah Papua, GRID, LOH Foundation, KPA Bokimaruru, Hanjuang Mahardika, GReS Intitute

Bekerja atas dukungan FAO-EU FLEGT Programme, KLHK, EU Delegation, EFI, MFP

Publikasi ini dibuat dengan dukungan *FAO-EU FLEGT Programme*, yang didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan Uni Eropa.

Pandangan yang diungkapkan di sini sama sekali tidak dapat dianggap pendapat resmi FAO, Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris atau Uni Eropa.

PEMANTAUAN INDEPENDEN

Pencapaian dan Pembelajaran dalam Memperluas Cakupan dan Jangkauan Pemantauan Independen¹

Fakta Kunci

IFM Fund terus berupaya memperkuat peran pemantau independen, baik dari organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat (adat dan lokal), kelompok perempuan, termasuk juga organisasi jaringan pemantau independen kehutanan di Indonesia. IFM Fund telah mendukung lebih kurang dari 380 pemantau independen (PI) melalui pelibatan mereka di berbagai kegiatan pertemuan (konsolidasi, lokakarya, perencanaan strategis, FGD) yang diselenggarakan IFM Fund, maupun dalam bentuk kerjasama melalui hibah kecil untuk mengikuti pelatihan dan pemantauan independen sejak akhir tahun 2018. IFM Fund bersama mitra-mitranya melakukan pemantauan mulai dari unit manajemen di hutan alam dan tanaman, penggunaan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok), industri hilir, sampai dengan penebangan ilegal di kawasan lindung dan konservasi. Perluasan jangkauan dan cakupan ini berkontribusi terhadap upaya penguatan implementasi SVLK dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penebangan & perdagangan kayu ilegal dan pembenahan tata kelola hutan di Indonesia.

Pemantauan Independen Efektif untuk Memperkuat Tata Kelola Hutan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (dan Kelestarian) atau SVLK bertujuan memastikan kayu dan produk kayu dari Indonesia dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumbernya yang legal dan lestari. Sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan, pemantau independen sebagai bagian integral dari sistem ini, telah terlibat aktif sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil untuk ikut membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Peran Pemantau Independen (PI) diakui di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 8 tahun 2021², dan memiliki kewajiban serta hak sebagai pemantau independen, diantaranya: memperoleh informasi yang relevan untuk kegiatan pemantauan; mendapatkan perlindungan dan akses ke lokasi pemantauan; termasuk adanya dukungan pendanaan dari berbagai sumber bagi pemantau independen.

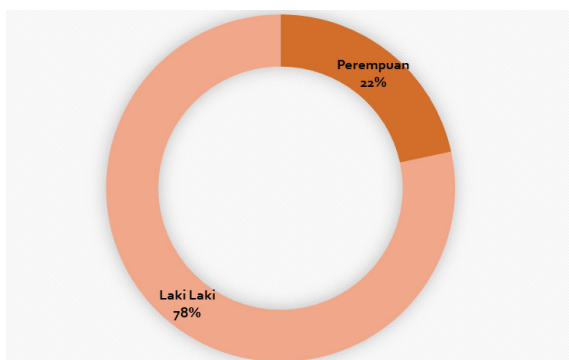
¹ Pencapaian dan pembelajaran dalam memperluas cakupan dan jangkauan pemantauan independen di Indonesia diimplementasikan sejak September 2018

² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Kemampuan pemantau independen menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap penguatan implementasi SVLK. Oleh karenanya ada kebutuhan untuk meningkatkan frekuensi pemantauan dan kapasitas pemantau independen.

Untuk itu, sejak September 2018 FAO-EU FLEGT Programme telah berkomitmen untuk memberikan dukungan pendanaan kepada IFM-Fund dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memperkuat peran pemantau independen, termasuk kualitas kegiatan pemantauan itu sendiri. Proyek kerjasama ini sejalan dengan mandat IFM-Fund dalam memfasilitasi dukungan pendanaan bagi konstituennya dalam hal peningkatan kapasitas, konsolidasi, pemantauan independen, serta berbagi informasi untuk memperkuat pemantau independen (PI) di Indonesia. Secara paralel berupaya untuk mengembangkan sebuah mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk menjamin kepastian pemantauan yang efektif.

Selama pelaksanaan proyek kerjasama ini, pelibatan para pihak menjadi hal penting untuk memberikan dukungan dan komitmen mereka dalam penguatan peran pemantau independen. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di bawah proyek kerjasama ini, setidaknya telah melibatkan 450 orang yang berasal dari: pemantau independen, pemerintah, bisnis, lembaga sertifikasi & akreditasi, kalangan akademisi dan lembaga internasional/donor, dengan komposisi 78% laki-laki dan 22% perempuan (Gambar 1).

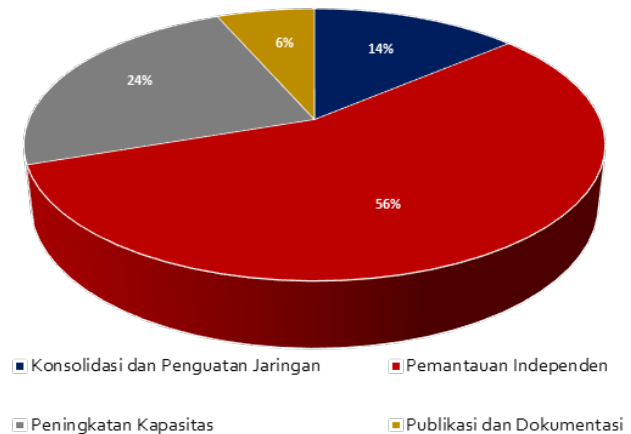


Gambar 1. Keterlibatan Para Pihak pada Seluruh Kegiatan (Sumber: IFM Fund, 2021)

Sedangkan sebagai upaya memperluas jangkauan pemantauan, maka IFM Fund telah mendukung kurang lebih 380 pemantau

independen berasal dari organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat adat, maupun kelompok-kelompok perempuan dan pemuda, melalui pelibatan mereka di berbagai kegiatan pertemuan (konsolidasi, lokakarya, perencanaan strategis, FGD) yang diselenggarakan IFM Fund; maupun dalam bentuk kerjasama melalui hibah kecil untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan kegiatan pemantauan independen.

Selama 2018-2021 dengan dukungan pendanaan FAO-EU FLEGT Programme (fase 1 dan 2), IFM Fund telah memfasilitasi berbagai kegiatan pemantauan independen melalui 26 hibah kecil yang tersebar di 13 provinsi, yang terdiri dari 19 hibah kecil untuk kegiatan pemantauan di lapangan dan 7 hibah kecil untuk pelatihan. Pemberian hibah terbesar untuk memfasilitasi kegiatan pemantauan di lapangan yaitu 56% dan diikuti oleh kegiatan pelatihan (24%) dari total dana hibah yang disalurkan sekitar Rp. 1,5 miliar. Kemudian dukungan pendanaan untuk penyelenggaraan berbagai pertemuan (diselenggarakan IFM Fund maupun bekerjasama dengan mitra) sebesar 14% dan sebesar 6% dialokasikan untuk pembuatan publikasi hasil pemantauan dan promosi, serta dokumentasi film (Gambar 2).



Gambar 2. Dukungan Pendanaan Kegiatan dan Penyaluran Hibah Kecil kepada Mitra (Sumber: IFM Fund, 2021)

Pemantau independen yang telah mengikuti proses peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, kemudian menerapkan keterampilan investigasi yang dimilikinya, untuk memantau pelaksanaan SVLK dan praktik-praktik ilegal lainnya, mulai dari kinerja unit manajemen di hutan alam dan tanaman industri hilir, penggunaan DKP, sampai dengan penebangan di kawasan lindung dan konservasi³.

³ IFM Fund. 2021. Pendanaan Berkelanjutan untuk Kebutuhan Pemantauan yang Efektif

Setidaknya, ada sekitar 68 pemantau independen (komposisi 61 laki-laki dan 7 perempuan) yang terlibat langsung untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Berikut ini merupakan ringkasan dari perkembangan dan capaian pemantauan independen:

Kinerja Pemantauan Independen (PI). Di tengah tantangan yang masih dihadapi pemantau independen, terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, IFM Fund masih terus mendukung berbagai aktivitas pemantauan sebagai upaya penegakan hukum dan evaluasi sistem. IFM Fund telah mendukung organisasi dan kelompok pemantau independen yang tersebar di 12 provinsi, yang secara langsung berkaitan dengan core business IFM Fund, yaitu pemantauan independen di lapangan. Secara umum kegiatan pemantauan independen berhasil menemukan dan mengungkap berbagai (indikasi) permasalahan dan pelanggaran implementasi SVLK, termasuk penyalahgunaan izin, pemalsuan dokumen, penjualan dan pengolahan kayu secara ilegal, penebangan ilegal di kawasan

konservasi, ketidaksesuaian dengan rencana kerja, dan perambahan kawasan hutan⁴.

Sebagai upaya penguatan sistem dan penegakan hukum, surat keluhan maupun laporan kasus telah disampaikan kepada lembaga sertifikasi, Dinas Kehutanan, Ditjen Gakkum dan lembaga penegak hukum lainnya. Surat keluhan dan laporan kasus berdasarkan temuan-temuan hasil pemantauan yang telah dilakukan di Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Beberapa surat keluhan telah dilaporkan, namun ada juga yang masih ditangani oleh Lembaga Sertifikasi atas dugaan: ketidaksesuaian penilaian, penebangan liar maupun pelanggaran yang dilakukan oleh unit manajemen hutan dan koperasi masyarakat (kopermas), yang dilaporkan oleh Perkumpulan Panah Papua⁵, Sekretariat Nasional JPIK dengan dukungan AMAN Tano Batak⁶. Ada juga yang sampai kepada pemberian sanksi berupa pembekuan sampai pencabutan sertifikasi, seperti kasus yang dipantau oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi (Focal Point JPIK) di Jawa Timur⁷, serta Komunitas Pecinta Alam (KPA) Bokimoruru dan Forest Watch Indonesia (FWI) terkait illegal logging yang terjadi di Maluku Utara⁸.



© Alam Hijau (AHi)/JPIK Jambi

⁴ <https://www.forestfund.or.id/mitra/monitoring>

⁵ Panah Papua. 2021. Lembar Fakta: Peredaran Kayu Ilegal pada IPK Kopermas Kami-Nassey di Provinsi Papua Barat

⁶ AMAN Tano Batak. 2021. Lembar Fakta: Monitoring pada PT TLP

⁷ PPLH Mangkubumi. 2019. Laporan Monitoring: Mengungkap Sisi Gelap Bisnis Kayu Ilegal di Jawa Timur

⁸ KPA Bokimoruru dan FWI. 2020. Laporan Pemantauan: Identifikasi Modul-Modul Illegal Logging di Maluku Utara. Studi Kasus di Desa Fritu, Halmahera Tengah

Hasil pemantauan tidak hanya untuk penguatan sistem, namun juga berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum, seperti: dugaan perdagangan kayu ilegal⁹, pemalsuan izin Menteri Kehutanan untuk pelepasan kawasan hutan serta adanya kopermas ilegal yang sedang beroperasi di Provinsi Papua Barat yang dilaporkan ke Gakkum oleh Perkumpulan Panah Papua¹⁰, dugaan illegal logging di areal hutan alam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil di Riau yang dilaporkan ke Bareskrim POLRI oleh Jikalahari¹¹ dan dugaan illegal logging di Cagar Alam Pulau Salawati Papua Barat ke Dinas Kehutanan oleh Papua Forest Watch. Di Bengkulu, masyarakat yang didampingi oleh Genesis melakukan pemantauan, advokasi dan upaya penegakan hukum untuk melindungi wilayah hutan mereka yang terancam oleh perambahan ilegal oleh perusahaan sawit¹². Selain itu, LOH Foundation melakukan pemantauan terhadap kondisi sumberdaya hutan dan tata usaha peredaran kayu di kabupaten Sumbawa dan mengirimkan laporan keluhan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dugaan kasus illegal logging¹³.

Perluasan Jangkauan Pemantauan melalui Peningkatan Kapasitas Komunitas Masyarakat dan Kelompok Perempuan. Peningkatan kapasitas pemantauan independen bertujuan untuk melengkapi peran pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah dalam memberikan umpan balik yang tepat bagi penguatan SVLK dan perbaikan tata kelola hutan Indonesia¹⁴. Setidaknya ada tujuh (7) penyelenggara pelatihan yang didukung oleh IFM Fund, yaitu di Provinsi Bengkulu, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Papua Barat dan Jawa Timur (dua pelatihan). Selain melatih organisasi masyarakat sipil, target untuk memperluas jangkauan pemantauan adalah dengan menyiapkan kapasitas teknis bagi komunitas masyarakat lokal dan adat, serta kelompok-kelompok perempuan dan pemuda.

Pelatihan oleh Deling Kuning di Jawa Timur bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan bagi kelompok perempuan untuk melakukan pemantauan yang efektif dan terintegrasi. Berbekal dengan keterampilan teknis dan pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan, kemudian diperkuat dengan pendampingan intensif, menjadikan komunitas masyarakat adat dan lokal, kelompok perempuan dan pemuda menjadi aktor penting dalam pemantauan.



⁹ <https://www.voaindonesia.com/a/klhk-amankan-344-kontainer-kayu-ilegal-asal-papua-di-surabaya/4746726.html>

¹⁰ <https://koreri.com/2021/09/07/bantah-palsukan-sk-mentri-kehutanan-runaweri-ijin-kopermas-sesuai-prosedur/>; artikel Majalah Tempo 6 November 2021: Deforestasi Terencana di Papua

¹¹ JIKALAHARI. 2021. Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Illegal logging di Areal Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK)

¹² Genesis. 2021. Lembar Fakta: Kayu-Kayu Tidak Beridentitas Milik PT. BAT

¹³ <https://www.forestfund.or.id/mitra/hancurnya-hutan-sumbawa>

¹⁴ IFM Fund. 2020. Kertas Kebijakan: Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen Kehutanan di Indonesia

Komunitas pemantau independen perempuan Deling Kuning menyampaikan :

"Kami sangat berterima kasih kepada IFM Fund atas eksistensinya dalam mendukung aktivitas pemantauan independen untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan bagi kelompok perempuan sehingga menjadi pemantau independen yang dapat diandalkan."

Di provinsi Bengkulu, dukungan kepada Genesis untuk melakukan pemantauan dan pendampingan satu komunitas masyarakat dalam mengadvokasi penyelamatan hutan, yang terancam oleh perambahan ilegal oleh perusahaan kelapa sawit. Hasil pemantauan oleh peserta pelatihan yang bekerjasama dengan media untuk penyebarluasannya, telah menjadi perhatian lembaga penegak hukum untuk melakukan penangkapan kepada para pelaku¹⁵.

Perkumpulan Absolute Indonesia mengadakan pelatihan terhadap pelaksanaan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) untuk mendukung kredibilitas dan akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya memperkuat kapasitas pemantau independen, tetapi pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan bermanfaat untuk pembenahan industri kayu skala kecil dan menengah milik masyarakat dalam penerapan DKP¹⁶. Pelatihan perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas pemantauan peredaran kayu diselenggarakan di Kepulauan Aru, Maluku, diikuti oleh komunitas masyarakat adat yang tergabung di dalam gerakan #SaveAru, serta keikut-sertaan kelompok pemuda pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan LOH di Sumbawa, NTB.



¹⁵ FAO-EU FLEGT PROGRAMME. 2021. *Success story Indonesia: Increasing the scope and reach of independent forest monitoring*

¹⁶ Absolute Indonesia. 2021. Lembar Fakta. Hutan Rakyat dan IKM di Jawa Barat: Strategis untuk Dikembangkan, Namun Belum Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Penguatan Peran Pemantau Independen di Berbagai Forum dan Dialog Kebijakan.

Keberadaan Komite Implementasi Bersama atau Joint Implementation Committee (JIC) untuk memfasilitasi pengawasan dan pelaksanaan perjanjian VPA-FLEGT antara pemerintah Indonesia – Uni Eropa. Wadah ini memberikan kesempatan bagi pemantau independen untuk menyampaikan capaian maupun menyuarakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemantauan sebagai upaya bersama menjaga kredibilitas SVLK.

Akses terhadap data dan informasi, jaminan perlindungan dan akses ke lokasi pemantauan, serta adanya dukungan pendanaan yang berkelanjutan, sebagai bagian hak dari pemantau independen masih menjadi perhatian dan perlu terus diperkuat agar pemantau independen bisa menjalankan perannya secara optimal¹⁷. Aspek keamanan dan keselamatan merupakan hal krusial yang perlu dikongkritkan. Penghadangan dan intimidasi masih dihadapi oleh pemantau independen ketika melaporkan temuannya, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (JPIK, 2019) dan Papua Barat (Panah Papua, 2021). Kemudian kebutuhan pendanaan melalui strategi pendanaan jangka menengah-panjang untuk memberi jaminan dukungan pendanaan berkelanjutan menjadi hal penting untuk direalisasikan.

Implementasi Strategi Pendanaan Jangka Pendek dan Menengah-Panjang. Berdasarkan pengalaman dari organisasi pemantau independen selama ini, penggalangan dana yang diperoleh dalam bentuk kerjasama dari lembaga donor, belum cukup menjangkau untuk seluruh target lokasi pemantauan dan kejadian yang seharusnya dipantau, termasuk untuk meningkatkan kapabilitas para pemantau¹⁸. Dengan melihat urgensi kebutuhan pendanaan ini, di samping melanjutkan upaya penggalangan dana dari donor sebagai strategi pendekatan jangka pendek, maka opsi sumber pendanaan jangka menengah-panjang untuk menjamin ketersediaan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, menjadi hal penting untuk direalisasikan.

Strategi IFM Fund untuk mengakses fee pengurusan legalitas kayu perlu dilanjutkan dan diupayakan keberhasilannya, selain itu nampaknya basis pendanaan berkelanjutan juga perlu digali dari anggaran negara di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Peluang pendanaan lain yang perlu dilanjutkan adalah menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). BPD LH dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh (1) pemilik dana dan (2) pemilik aset atau jasa atau proyek yang berhubungan dengan sumber dana. Peluang pendanaan bagi PI dalam konteks implementasi SVLK dimungkinkan, jika pemberi mandat memberikan ruang itu kepada BPD LH. Kuncinya adalah relevansi pemantauan legalitas kayu dengan Sustainable Forest Management (SFM) dalam mendukung REDD+¹⁹.

Portofolio Investasi dan Hibah Kecil IFM Fund.

Secara umum, portofolio investasi dan hibah kecil sebesar USD 5,000 – 10,000, menunjukkan kaitan langsung antara hibah yang disediakan untuk mitra-mitra dengan ketiga tujuan IFM Fund²⁰. Kegiatan yang didukung berkontribusi langsung dalam penguatan dan fasilitasi pembangunan kapasitas, pemantauan independen kehutanan dan distribusi pemanfaatan hasilnya, serta dalam pertukaran informasi yang mendukung pemantauan independen kehutanan di Indonesia. Secara lebih khusus, portofolio hibah kecil IFM Fund telah menghasilkan keluaran berupa keterlibatan dan kemampuan masyarakat sipil melakukan pemantauan independen dalam kerangka implementasi SVLK dan FLEGT, terbangun dan terujinya mekanisme hibah kecil IFM Fund, dan penguatan struktur, peran, dan kelembagaan IFM Fund²¹.

¹⁷ IFM Fund. 2019. Kertas Kebijakan: Penguatan Peran Pemantau Independen akan berdampak Positif terhadap Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

¹⁸ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan Independen dan Mobilisasi Sumber Daya

¹⁹ IFM Fund. 2020. Kertas Kebijakan: Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen Kehutanan di Indonesia

²⁰ IFM Fund, 2020. Laporan Perkembangan 2017-2020

²¹ IFM Fund. 2020. IFM Fund Portfolio Review oleh Ambrosius Ruwindrijarto

Ke depan IFM Fund perlu mengembangkan keanekaragaman fokus dalam kegiatan-kegiatan pemantauan independen. Dalam hal ini cakupan hibah kecil IFM Fund akan meluas juga ke sektor-sektor dan aspek-aspek lain yang masih berada di dalam koridor visi dan misi IFM Fund tentang tata kelola kehutanan, misalnya aspek korupsi dalam proses perolehan izin, termasuk izin konsesi

maupun legalitas kayu; pemantauan deforestasi yang disebabkan oleh perambahan hutan dan ekspansi areal perkebunan yang tidak memiliki izin, serta konflik tenurial antara masyarakat dan konsesi (beyond SVLK).



© JPIK

Tantangan Perluasan dan Pendekatan

Pemantauan. Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan baru untuk menjaga kondisi hutan dalam kondisi idealnya. Pembatasan pergerakan telah mengurangi kehadiran fisik di lapangan, untuk itu pemantau independen (PI) perlu mengembangkan konsep pemantauan virtual dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan jaringan yang dimiliki. Selain itu, dalam lingkup pemantau yang lebih luas (scale up the scope of monitoring) berbasis yurisdiksi dapat menjadi terobosan baru dalam pemantauan²².

Semakin luasnya cakupan dan jangkauan pemantauan independen akan berkontribusi menjaga kredibilitas SVLK dan berkontribusi dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, partisipasi pemantau independen sebagai bagian dari masyarakat sipil yang aktif memantau perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, baik dari sisi aksesibilitas pemantauan maupun dukungan pendanaan untuk keberlanjutan pemantauan. Aksesibilitas untuk pemantauan yang efektif dibutuhkan agar pemantau independen mampu menjadi agen perubahan dan sumber informasi dalam kerangka pembenahan tata kelola hutan yang baik²³.

Selain untuk pemantauan dan konsolidasi, dukungan pendanaan juga dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas pemantau independen, termasuk kelompok masyarakat yang beririsan langsung dengan unit pengelolaan hutan. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan kepastian pendanaan agar proses monitoring dan evaluasi sistem dapat terus berjalan secara simultan.

**Independent Forest Monitoring Fund
(IFM Fund)**

**Gedung Setyajaya Blok J
Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kelurahan
Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur,
Kota Bogor**

0251 - 8347 835, 8347 415

²² IFM Fund. 2021. Pendanaan Berkelanjutan untuk Kebutuhan Pemantauan yang Efektif

²³ *ibid*